

## Dari Wake-Up Call ke Ujian Sistem: Membaca Ulang Arah Penanggulangan Bencana 2025–2029



Dialog Strategis Kemitraan untuk Penguatan Penanggulangan Bencana di Indonesia yang diselenggarakan pada 12 Februari 2026 menjadi ruang refleksi penting bagi komunitas kebencanaan nasional. Forum ini mempertemukan pemerintah, masyarakat sipil, mitra pembangunan, dan akademisi untuk mendiskusikan arah kebijakan Penanggulangan Bencana (PB) 2025–2029 sebagaimana dipaparkan oleh bapak Dr. Raditya Jati, Deputy Bidang Sistem dan Strategi Penanggulangan Bencana BNPB.

Saat ini kita ketahui bersama bahwa hadirnya beragam aktor penanggulangan bencana di Indonesia baik dari organisasi masyarakat sipil (OMS), lembaga internasional, sektor swasta, akademisi, media, lembaga filantropi, hingga organisasi berbasis komunitas. Keberagaman aktor ini memerlukan sebuah forum strategis yang dapat mempertemukan berbagai pihak lintas sektor untuk membangun kemitraan yang sejajar, memperkuat sinergi, dan menyelaraskan arah penanggulangan bencana ke depan.

Kegiatan dialog strategis ini diinisiasi untuk menjawab kebutuhan tersebut, dengan menjadi ruang diskusi strategis berkala antara pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, donor, akademisi, dan lembaga internasional. Forum ini diharapkan mampu mendorong lahirnya kesepahaman bersama, kolaborasi yang lebih produktif, serta langkah-langkah konkret menuju sistem penanggulangan bencana yang inklusif, efektif, dan berorientasi pada pemenuhan hak masyarakat atas perlindungan dan rasa aman dari dampak bencana.

## **Risiko Indonesia: Tinggi, Sistemik, dan Tidak Lagi Sederhana**

Paparan Deputi bidang Sistem dan Strategi PB BNPB menegaskan bahwa Indonesia menghadapi risiko yang semakin sistemik akibat perubahan iklim, urbanisasi, dan dinamika pembangunan. Peta Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2024 menunjukkan tidak ada satu pun kabupaten/kota dalam kategori risiko rendah. Sehingga, risiko bencana adalah realitas struktural nasional, bukan persoalan sporadis.

Tsunami Aceh 2004 disebut sebagai *wake-up call* kebencanaan nasional. Lalu saat Gempa dan Tsunami Sulawesi Tengah disebut momentum bagi penanggulangan bencana di Indonesia. Namun kejadian besar di Sumatera pada 2025 menunjukkan bahwa meskipun sistem respons membaik, dampak sosial dan fiskal tetap sangat besar. Dalam konteks ini, pertanyaan mendasar muncul: **apakah kita sedang menghadapi wake-up call baru untuk kesekian kalinya, atau ujian terhadap efektivitas sistem yang telah kita bangun?**

### **Dari Ancaman Alam ke Risiko Baru akibat Pembangunan**

Avianto Amri, Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) memulai menanggapi bahwa risiko hari ini tidak hanya berasal dari ancaman geologi dan hidrometeorologi yang sudah terjadi di masa-masa sebelumnya, tetapi juga risiko baru akibat proses pembangunan itu sendiri.

Alih fungsi lahan, eksploitasi sumber daya alam, ekspansi kawasan investasi di wilayah rawan, dan lemahnya pengawasan berbasis risiko memperbesar eksposur dan kerentanan. **Sebagian risiko yang kita hadapi hari ini adalah risiko yang diproduksi oleh pilihan pembangunan.**

Meskipun IRBI menunjukkan tren perbaikan, korelasi antara peningkatan kejadian bencana dengan tekanan tata guna lahan tidak bisa diabaikan. Ini mengarah pada persoalan yang lebih mendalam: Indonesia tidak kekurangan regulasi, tetapi masih lemah dalam instrumen koreksi kebijakan berbasis risiko.

[RIPB 2020–2044](#) dan [RENAS PB 2025–2029](#) telah tersedia sebagai arsitektur kebijakan nasional. Namun efektivitasnya ditentukan oleh sejauh mana analisis risiko benar-benar menjadi dasar izin investasi, revisi RTRW, dan penataan kawasan.

Diskusi kemudian menyentuh dimensi yang jarang dibicarakan secara eksplisit, yaitu *political economy of risk*. Selama insentif fiskal dan politik daerah lebih kuat mendorong ekspansi ekonomi dibanding mitigasi risiko, maka risiko akan terus direproduksi. Tanpa disinsentif terhadap pembangunan yang meningkatkan eksposur, sistem akan kesulitan mencegah produksi risiko baru.

Pertanyaan yang muncul bukan lagi soal teknis kebencanaan, melainkan bagaimana sistem memiliki daya koreksi terhadap kebijakan lintas sektor. Peta Jalan Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) 2024 – 2045 telah mengantisipasi problem ini dengan mendorong integrasi analisis dalam tata ruang, investasi, dan perencanaan desa. Namun tantangannya terletak pada sejauh mana peta jalan tersebut menjadi rujukan operasional lintas sektor, bukan hanya dokumen komunitas kebencanaan.

### **Kekuatan Masyarakat Sipil: Dari Respons ke Integrasi Sistem**

Pembelajaran dari respons Sumatera menunjukkan mobilisasi masyarakat sipil yang sangat besar. Desk Relawan BNPB mencatat sekitar 400 organisasi dan lebih dari 14.000 relawan terlibat. Di luar itu, sekitar 180 organisasi terkoordinasi dalam Indonesian Humanitarian

Coordination Platform (IHCP). Fakta ini menunjukkan bahwa masyarakat sipil adalah pilar krusial dalam sistem penanggulangan bencana di Indonesia.

Namun kekuatan ini belum sepenuhnya terintegrasi secara kelembagaan dalam proses perumusan dan evaluasi kebijakan. MPBI menekankan pentingnya membangun mekanisme umpan balik yang inklusif sehingga aspirasi dari masyarakat, baik itu berupa keresahan, saran, dan perspektif masyarakat dapat disalurkan langsung bekerja sama dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di daerah dan Forum PRB secara sistematis. Tanpa *feedback loop* di nasional yang terstruktur dan sistematis, transformasi tata kelola akan berhenti di tingkat pusat.

Mobilisasi organisasi dan ribuan relawan menunjukkan bahwa kapasitas sosial Indonesia jauh melampaui struktur formal negara, namun kekuatan ini perlu diposisikan bukan hanya sebagai respons kebencanaan melainkan sebagai fondasi transformasi sistem melalui kolaborasi pentahelix. Pemerintah berperan sebagai regulator dan pengarah kebijakan, OMS sebagai penggerak akar rumput dan penjaga akuntabilitas, sektor usaha sebagai investor dalam pengurangan risiko dan pengaman rantai pasok, akademisi sebagai penyedia basis evidensi dan inovasi, serta media sebagai penguat literasi risiko publik. Sinergi inilah yang menentukan apakah kebijakan strategis seperti RENAS PB bisa terimplementasi secara sistemik atau tetap berjalan sektoral. Berbagai aksi dan inisiatif ketangguhan seperti Desa Tangguh Bencana, Forum PRB daerah, edukasi risiko di sekolah, hingga integrasi analisis risiko dalam perencanaan menunjukkan bahwa jejera kolektif lintas aktor dapat menggeser paradigma dari respons menuju pencegahan.

Dalam konteks ini keberadaan Peta Jalan PRBBK 2024 – 2045 menjadi relevan sebagai instrumen pelembagaan gerakan komunitas dalam kerangka sistem nasional. Peta jalan ini tidak hanya memuat target perluasan PRBBK tetapi juga menekankan pada tata Kelola, integrasi PRBBK dalam dokumen perencanaan di daerah, serta mekanisme pemantauan partisipatif melalui forum pentahelix. Advokasi PRBBK menjadi penting agar praktik berbasis komunitas tidak berhenti pada respons kebencanaan melainkan menjadi bagian dari sistem kebijakan pembangunan berbasis risiko.

### **Blind Spots yang Perlu Diantisipasi**

Paparan juga ditanggapi oleh Philips J. Vermonte, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas International Islam Indonesia dan peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) yang memperluas diskusi ke level yang lebih strategis. Berangkat dari pengalaman gempa dan likuifaksi Palu 2018, muncul kesadaran bahwa riset tidak boleh berhenti pada “research into policy”, tetapi harus bergerak ke “research into policy implementation”. Menurut pandangan ini, Indonesia sebenarnya telah memiliki kerangka kebijakan yang relatif lengkap. Namun tantangannya adalah bagaimana hasil kajian benar-benar diimplementasikan dan tidak berhenti pada dokumen.

Akademisi juga mengingatkan sejumlah “blind spots” yang jarang diperhitungkan dalam perencanaan kebencanaan. Salah satunya adalah geopolitik. Perubahan konfigurasi global, termasuk potensi penarikan dukungan pendanaan internasional, dapat memengaruhi kapasitas pembiayaan pengurangan risiko di negara berkembang. Selain itu, momentum kepemimpinan Indonesia di ASEAN pada 2027 dapat menjadi peluang untuk memperkuat agenda kebencanaan regional melalui AHA Centre dan kerja sama lintas negara.

*Blind spot* lainnya adalah konflik dan pergeseran anggaran nasional. Dalam situasi ketidakpastian global, alokasi anggaran dapat bergeser, dan ini berpotensi mengurangi investasi pada kesiapsiagaan. Karena itu, **advokasi agar anggaran pengurangan risiko tetap menjadi**

**prioritas menjadi penting, dan peran masyarakat sipil dalam mendorong isu ini sangat krusial.**

Aspek lain yang mengemuka adalah good governance. Contoh siklon Seroja di NTT menunjukkan bahwa kerusakan besar pada bangunan tidak semata karena skala bencana, tetapi bisa berkaitan dengan kualitas konstruksi dan tata kelola. Korupsi dan lemahnya pengawasan bangunan dapat menjadi faktor yang memperbesar korban bencana. Ini membuka ruang riset lanjutan mengenai hubungan antara tata kelola dan tingkat dampak bencana.

Akademisi juga menekankan pentingnya pelibatan TNI dalam kerangka *military operation other than war* dengan pendekatan kemanusiaan yang jelas. Contoh dari *defence white paper* Selandia Baru menunjukkan bahwa doktrin militer dapat diadaptasi untuk respons bencana berbasis kolaborasi sipil-militer.

Lebih jauh, sensitivitas birokrasi terhadap risiko perlu diperkuat. Jika kesadaran risiko tidak masuk dalam proses penyusunan anggaran daerah, maka kita akan terus kehilangan peluang pencegahan. Pendidikan kebencanaan bagi calon pejabat publik, termasuk melalui Lemhanas, diusulkan sebagai langkah strategis jangka panjang.

### **Investasi, Akurasi Kajian Risiko, dan Build Back Better**

Perwakilan dari Japan International Cooperation Agency (JICA), Ryoji Takahashi, memberikan perspektif komparatif antara Indonesia dan Jepang. Indonesia dan Jepang sama-sama mengalami **gempa besar dengan magnitudo di atas 9. Namun jumlah korban jiwa menunjukkan perbedaan signifikan. Perbedaan tersebut bukan semata soal keberuntungan, tetapi soal investasi jangka panjang pada infrastruktur, regulasi, dan pendidikan kebencanaan.**

Jepang mulai serius membangun sistem nasional kebencanaan sejak awal 1960-an, setelah taifun besar menjadi momentum refleksi nasional. Investasi besar dilakukan pada infrastruktur tahan bencana, sistem peringatan dini, dan pendidikan publik.

Salah satu faktor pembeda yang ditekankan adalah kualitas kajian risiko. Jepang menyusun skenario risiko dengan estimasi dampak yang sangat detail, hingga proyeksi jumlah korban luka, korban meninggal, dan kebutuhan evakuasi per wilayah. Kajian risiko yang akurat bukan hanya alat teknis, tetapi instrumen advokasi yang kuat untuk mendorong investasi.

Contoh di Tehran dan Metro Manila menunjukkan bahwa ketika estimasi dampak dipresentasikan secara rinci, pemangku kebijakan dan sektor swasta mulai melihat urgensi untuk bertindak. Di sinilah kajian risiko menjadi alat untuk mengubah mindset.

JICA juga menegaskan bahwa instansi penanggulangan bencana di pusat dan daerah adalah aktor utama dalam kajian risiko, tetapi implementasi rencana aksi harus melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk sektor usaha. Pelaporan kemajuan terhadap Sendai Framework dapat menjadi instrumen legitimasi untuk mendorong investasi pengurangan risiko. Pengamanan bangunan dan keberfungsian jejaring infrastruktur perkotaan menjadi prioritas konkret yang dapat ditindaklanjuti berdasarkan hasil kajian risiko.

### **Sistem yang Kuat, Tantangan Anggaran yang Nyata**

RENAS PB 2025–2029 menekankan penguatan tata kelola, integrasi satu data, dan investasi pengelolaan risiko. Namun forum juga mengakui adanya keterbatasan anggaran pada fungsi sistem dan pencegahan. Di sinilah muncul paradoks kebijakan. Kita memiliki arsitektur sistem yang matang, tetapi menghadapi tantangan keberlanjutan implementasi.

Sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan dialog, sebaik apa pun sistem dan strategi, keberhasilannya tetap bergantung pada leadership dan kompetensi SDM yang mengoperasikannya. Tanpa investasi pada kapasitas manusia, sistem berisiko menjadi infrastruktur tanpa penggerak.

### **Tiga Refleksi Strategis untuk Masa Depan**

Dialog ini mengerucut pada tiga refleksi besar.

- Pertama, **bagaimana memastikan pembangunan tidak memproduksi risiko baru?**
- Kedua, **bagaimana membangun mekanisme kelembagaan agar suara masyarakat sipil memiliki pengaruh nyata dalam koreksi kebijakan, termasuk melalui pelembagaan Peta Jalan PRBBK sebagai instrument advokasi kolektif?**
- Ketiga, **bagaimana menjaga keberlanjutan transformasi tata kelola di tengah keterbatasan anggaran?**

Pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan bahwa tantangan utama kita bukan lagi pada respons darurat, melainkan pada reformasi tata kelola risiko.

### **Dari Respons ke Pencegahan: Ujian Keberanian Sistem**

Indonesia telah belajar dari 2004 dan memperkuat respons pada 2018. Kini, ujian sesungguhnya adalah kemampuan sistem untuk mencegah risiko diproduksi. Jika risiko pertama berasal dari geografi, maka risiko kedua berasal dari pilihan kebijakan. Dan risiko kedua sepenuhnya berada dalam kendali tata kelola kita.

Dialog ini menegaskan bahwa Indonesia tidak kekurangan dokumen kebijakan. Yang diuji hari ini adalah konsistensi implementasi, integrasi lintas sektor, dan keberanian sistem untuk mengoreksi pembangunan yang meningkatkan risiko.

Pada akhirnya, ketangguhan bangsa tidak hanya ditentukan oleh kesiapsiagaan dan respons, tetapi oleh kemampuan sistem untuk mengelola risiko sebelum ia menjadi bencana. END

*Kegiatan ini merupakan bagian dari program Pemerintah Indonesia yang didukung oleh Pemerintah Australia melalui program SIAP SIAGA. Untuk materi, notulensi, dan dokumentasi dialog strategis ini, silahkan akses: <https://bit.ly/DialogStrategisKemitraanPB>*